

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 12

No.2, Desember 2023

Halaman 183-198

Reframing Power: The Linguistic Representation of Women in Indonesian Politics

Suhartina

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
suhartina@iainpare.ac.id

Abstract

This research aims to unravel the formation of symbolic meaning in the discourse relating to women. The approach used was qualitative research, identifying aids, verbs, object words, proper words, connections, nominals, numerals, and sentences in texts with Fairclough's theory. The results show that the hierarchy of languages describes the ideology of gender equality and the distribution of political power. The use of words, phrases, and sentences indicates the dominance of men in Indonesian politics, efforts to enhance the role of women in politics, as well as the hope of victory in elections. Critical discourse analysis helps to understand how discourses influence women's views and actions. This article is expected to raise awareness of the role of language in strengthening gender equality and emphasize the need for increased participation of women in political policy.

Keywords: *linguistic; women; politics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pembentukan makna simbolis dalam wacana yang berkaitan dengan perempuan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, mengidentifikasi kata bantu, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata hubung, frasa nomina, frasa numeralia, dan kalimat dalam teks dengan teori Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan hirarki bahasa menggambarkan ideologi kesetaraan gender dan distribusi kekuasaan politik. Penggunaan kata, frasa, dan kalimat menunjukkan dominasi laki-laki dalam politik Indonesia, usaha untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan, serta harapan atas kemenangan dalam pemilihan. Analisis wacana kritis membantu memahami pandangan dan tindakan perempuan dipengaruhi oleh wacana. Artikel ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan peran bahasa dalam memperkuat kesetaraan gender dan menekankan perlunya peningkatan partisipasi perempuan dalam kebijakan politik.

Kata Kunci: bahasa; politik; perempuan

PENDAHULUAN

Perempuan selalu diidentikkan dengan batasan-batasan tertentu. Meskipun isu kesetaraan gender telah lama diperjuangkan, tetapi hingga dekade ini perempuan masih sering termarginalkan. Diskusi terkait perempuan merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan gender. Hal ini memberikan landasan bagi kesetaraan hak, peluang, dan penghargaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan(Hendrastiti, 2021).

Wacana perempuan dalam berita politik menyoroti aspek penting dari dinamika ideologi dan kekuasaan dalam konteks pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang saat ini sedang memasuki babak baru. Terlibatnya perempuan dalam wacana politik tidak hanya menyoroti pentingnya representasi gender yang seimbang tetapi juga merupakan cerminan dari kekuatan politik yang berkembang dan ideologi yang tersembunyi(Huriani, 2021; Kuncoro *et al.*, 2023). Pada tingkat ideologis, memasukkan wacana perempuan dalam berita politik menggambarkan kepentingan dan perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan dalam struktur kebijakan. Sementara pada level kekuasaan, wacana perempuan membuka jendela pada distribusi kekuasaan politik di tengah arus dominasi pria dalam ranah politik Indonesia. Memahami cara berita politik menggambarkan dan merepresentasikan perempuan dapat mengungkapkan bagaimana ideologi dan kekuasaan calon capres dan cawapres tercermin dalam narasi publik.

Penelitian terkait wacana perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya dilakukan oleh Firli Penti, dkk yang menemukan bahwa media massa mainstream dianggap kurang memberikan porsi pemberitaan yang adil bagi perempuan selama pandemi, seringkali menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan komoditi, serta memiliki ketidakseimbangan gender dalam ruang redaksi(Fenti and Eddyono, 2021). Meskipun sama-sama membahas tentang Perempuan, tulisan ini tidak fokus ke media massa, tetapi fokus kepada tuturan capres dan cawapres di media massa. Sementara itu, penelitian terkait perempuan dan politik telah dilakukan oleh Anifatul K. yang menemukan bahwa perwakilan perempuan dalam pemerintahan adalah contoh politik. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017, Indonesia telah mendukung peran perempuan dalam politik. Namun, kenyataannya berbanding terbalik: perempuan anggota legislatif belum sepenuhnya terlibat dalam bidang politik (Kiftiyah, 2019). Penelitian yang dilakukan Anifatul ini berbeda dengan artikel ini, yang fokus pada representasi perempuan dalam politik kontemporer dan masa depan berdasarkan tuturan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan fokus pada analisis wacana perempuan dalam berita politik, peneliti menyelidiki pilihan kata, frase, dan struktur teks menampilkan atau bahkan menyembunyikan peran perempuan dalam politik. Ini membantu menafsirkan ideologi dan distribusi kekuasaan yang mendasari narasi politik yang dibangun di sekitar calon capres dan cawapres.

Analisis wacana kritis adalah pendekatan kritis yang memperhatikan dan menganalisis kekuatan, dominasi, dan struktur kekuasaan dalam wacana (Ambarudin, 2016). Dalam hal ini, fokusnya adalah pada aspek-aspek perempuan yang tercermin dalam tata bahasa, semantik, dan struktur teks. Analisis Fairclough digunakan sebagai metode untuk melihat wacana tentang perempuan direproduksi, diterima, atau digunakan dalam masyarakat (Nursusetyo, 2021; Husein and Wance, 2021; Nur Rohmah, 2022).. Dengan menggunakan pendekatan Fairclough, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami hubungan antara wacana dan konstruksi social budaya dilihat dari fitur kosakata, frasa, dan kalimat.

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Data diperoleh dari enam artikel berita online, yaitu, "Prabowo Soroti Peran Perempuan dalam Politik: Ke Depan Akan Muncul Perempuan-perempuan Hebat", "Anis Tekankan Perempuan Politik Harus Fokus pada Peningkatan Kualitas Diri", "Ganjar Pertimbangkan Perempuan Masuk Kabinetnya jika Terpilih" "Terima Dukungan Perdana, Gibran Janji Kuatkan Perlindungan Perempuan-Anak", dan "Janji Cak Imin untuk Kaum Perempuan Bila AMIN Menang Pilpres 2024", dan Mahfud MD: Baik Buruknya Sebuah Negara Tergantung pada Perempuan dan Ibu. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membaca berita; (2) mencatat informasi penting; dan (3) menyusun korpus untuk dianalisis dengan model analisis wacana kritis yang terdiri dari deskripsi, interpretasi, dan menyusun korpus untuk dianalisis dengan model analisis wacana kritis yang terdiri dari deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi menurut model Norman Fairclough.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Ideologi dan Kekuasaan Melalui Pilihan kata

Penggunaan berbagai jenis kata dalam sebuah teks atau wacana memiliki peran penting dalam memperkuat dan menggambarkan ideologi serta kekuasaan yang terkandung di dalamnya (Kabanga *et al.*, 2023). Analisis terhadap kata bantu/modalitas, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata penghubung, frasa nomina dan frasa numeralia dalam konteks peran perempuan dalam politik Indonesia

mengungkapkan beragam nuansa ideologis, mulai dari kesetaraan gender hingga distribusi kekuasaan politik.

Beragam jenis kata dalam konteks linguistik membantu mengungkap ideologi dan kekuasaan dalam sebuah teks atau wacana (Ilham et al., 2023). Mulai dari penggunaan kata bantu/modalitas hingga kata kerja, kata benda, kata sifat, kata penghubung, dan frasa numeralia, setiap jenis kata memainkan peran penting dalam memperkuat dan menggambarkan ideologi yang terkandung di dalamnya. Penggunaan kata "sebenarnya" pada kalimat "Kita tahu sekarang, *sebenarnya* peran perempuan sudah cukup menonjol di kabinet. Posisi-posisi kunci di tangan perempuan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan" memberi penekanan pada fakta, memperkuat ideologi kesetaraan gender dan memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara kata "sangat" menguatkan intensitas pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional, mencerminkan ideologi kesetaraan gender dan inklusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, kata "harus" menegaskan kewajiban moral dalam meningkatkan peran perempuan dalam politik, mencerminkan ideologi kesetaraan gender dalam memberikan peran yang setara dalam kebijakan. Penggunaan kata kerja "meyakini" menunjukkan keyakinan terhadap partisipasi perempuan dalam politik, mencerminkan ideologi akan kemampuan perempuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa. Pada sisi kata benda, penggunaan kata "kabinet" menyoroti distribusi kekuasaan politik dan kesetaraan gender dalam keputusan politik.

Selanjutnya, dalam kata sifat seperti "optimis", tergambar ideologi harapan, keyakinan, dan semangat positif dalam pencapaian tujuan politik. Penggunaan kata penghubung seperti "tapi", "namun", dan "di samping itu" menggambarkan kompleksitas pemikiran terkait keputusan atau pendapat yang disampaikan, menjelaskan ideologi inklusif dengan standar tinggi terkait kualifikasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, melalui penggunaan beragam jenis kata, penelitian ini berhasil menggambarkan ideologi kesetaraan gender, inklusi, kewajiban moral, dan distribusi kekuasaan politik dalam konteks peran perempuan dalam politik dan pembangunan nasional.

Representasi Ideologi dan Kekuasaan Melalui Pilihan frasa

Frasa benda "politik Indonesia" menyoroti pentingnya peran perempuan dalam ranah politik. Hal menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam struktur kekuasaan politik, dengan penekanan pada dominasi pria dalam politik Indonesia. Fokusnya pada perempuan-perempuan yang menduduki posisi strategis menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam struktur politik yang pada dasarnya didominasi oleh laki-laki.

Hal ini mencerminkan ideologi kesetaraan gender dan keinginan untuk memperluas partisipasi perempuan dalam pembentukan kebijakan (Ruwaida, 2016).

Frasa "tokoh perempuan yang memiliki keahlian dan layak untuk masuk dalam kabinet" menggambarkan ideologi inklusivitas gender dalam politik. Frasa ini menyoroti urgensi kesetaraan gender dalam proses pemilihan anggota kabinet berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan gender. Dengan mengutamakan kualifikasi dan keahlian, ini mencerminkan ideologi kesetaraan gender dalam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memainkan peran penting dalam kebijakan pemerintahan.

Frasa numeralia "minimal 60 persen" menunjukkan harapan atau target yang kuat untuk memenangkan pemilihan. Ini menyoroti pentingnya mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih, dengan target yang jelas dan ambisius. Ideologi di balik frasa ini adalah keinginan untuk memenangkan pemilihan dengan margin suara yang besar, mencerminkan upaya untuk memperkuat legitimasi politik dengan perolehan suara yang substansial.

Penelitian ini menggambarkan ideologi kesetaraan gender dalam politik, peran inklusif perempuan dalam kebijakan pemerintahan, serta pentingnya perolehan suara besar untuk memenangkan pemilihan politik. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju representasi gender yang lebih seimbang dalam kebijakan dan keputusan politik serta fokus pada dukungan yang kuat dari pemilih sebagai landasan legitimasi politik.

Representasi Ideologi dan Kekuasaan Melalui Pilihan kalimat

Kalimat-kalimat aktif dalam berita merepresentasikan ideologi dan kekuasaan dengan cara yang menonjolkan komitmen serta tindakan langsung dari individu yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Misalnya, kalimat yang menyoroti komitmen Cak Imin terhadap isu-isu perempuan jika terpilih, menonjolkan ideologi atau fokus yang akan dipegang dalam pembangunan kebijakan terkait perempuan. Penggunaan kalimat aktif dalam konteks ini memberikan penekanan pada pelaku atau subjek yang melakukan tindakan atau pernyataan, menegaskan tanggung jawab subjek terhadap ideologi atau fokus yang ingin ditonjolkan (Jupriono *et al.*, 2022).

Penggunaan kalimat aktif juga tercermin dalam pernyataan Ganjar Pranowo yang mengekspresikan cita-citanya untuk menjamin kesetaraan gender, khususnya dalam aspek pekerjaan, pendidikan, dan politik. Pernyataan ini mencerminkan ideologi politiknya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam masyarakat, terutama dalam konteks politik. Dalam pernyataan ini, penggunaan kalimat aktif memberikan kejelasan dan kekuatan pada pesan yang ingin

disampaikan, menegaskan keyakinan atau pandangan Prabowo secara langsung terhadap masalah tersebut.

Selain itu, pernyataan Prabowo tentang peran perempuan dalam politik juga menggunakan kalimat aktif untuk menegaskan pandangan dan keyakinannya sendiri. Penggunaan kalimat aktif dalam konteks ini memberi kejelasan bahwa Prabowo meyakini dan menyampaikan pandangannya secara langsung tentang peran perempuan dalam politik, menyoroti dan memberikan penekanan pada pandangan dan keyakinan pribadinya. Terkait dengan pemilihan kata-kata, penggunaan kalimat aktif memberikan penegasan yang lebih tajam terhadap keyakinan atau pandangan individu yang bersangkutan, menjelaskan ideologi mereka secara langsung (El Guindi, 2003; Assidik and Santoso, 2016; Husein and Wance, 2021; Nesi *et al.*, 2022; Pesiwarissa *et al.*, 2022). Kalimat pasif, dalam kasus ini, mungkin akan mengurangi fokus pada individu yang melakukan tindakan atau memiliki pandangan tertentu, sehingga mengurangi kejelasan terkait pemilik pendapat tersebut. Dengan demikian, penggunaan kalimat aktif tidak hanya menonjolkan individu sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tindakan atau pernyataan, tetapi juga memberikan kejelasan terhadap pandangan atau keyakinan yang disampaikan.

Refresentasi Nilai Budaya

Nilai-nilai budaya yang tercermin pada wacana yakni nilai budaya yang menghargai peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik dan pemerintahan. Ini mencerminkan semangat untuk memajukan budaya yang lebih inklusif, di mana perempuan diakui dan diberikan peran yang penting dalam ranah publik. Pembahasan tentang kesetaraan gender menunjukkan pergeseran budaya yang lebih inklusif dan progresif, di mana masyarakat semakin memahami pentingnya pemberdayaan semua individu tanpa memandang gender (Larasati *et al.*, 2023).

Dalam pandangan calon presiden, penonjolan peran perempuan dalam politik Indonesia menjadi sorotan. Hal ini dapat dilihat pada tuturan Prabowo yang menggarisbawahi posisi strategis perempuan di kabinet, seperti jabatan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, ia menegaskan peran penting mereka dalam struktur kekuasaan. Menurutnya, seorang Menlu perempuan bahkan dijuluki sebagai "the iron lady," menyoroti keberanian dan ketegasannya dalam menjalankan tugasnya, yang diakui bahkan lebih dari Menteri Pertahanan. Kutipan lain terkait pandangan Prabowo terhadap Perempuan dapat dilihat pada data berikut

1. "Kita tahu sekarang, sebenarnya peran perempuan sudah cukup menonjol di kabinet. Posisi-posisi kunci di tangan perempuan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan," ungkap Prabowo.
2. "Menteri Luar Negeri, karena saya sering berdampingan sama beliau, saya kira salah satu Menlu terhebat dalam sejarah bangsa Indonesia, dan perempuan. Bahkan, (Menlu) dijuluki sebagai the iron lady, kadang-kadang lebih galak dari Menteri Pertahanan," jelas Prabowo
3. "Bahkan, (Menlu) dijuluki sebagai the iron lady, kadang-kadang lebih galak dari Menteri Pertahanan," jelas Prabowo
4. "Kita melihat Gubernur kita yang hebat-hebat adalah perempuan. Ibu Khofifah sebagai contoh," ungkapnya.
5. Di partai saya juga beberapa wakil ketua umum sudah dari perempuan. Mereka sangat berperan. Di dunia akademis, di universitas-universitas saat ini sudah banyak sekali perempuan yang hebat-hebat, menonjol, dan brilian. Jadi, saya kira beberapa saat lagi pasti mereka akan muncul di tingkat nasional," pungkas Prabowo.
6. Kita tahu sekarang, sebenarnya peran perempuan sudah cukup menonjol di kabinet. Posisi-posisi kunci di tangan perempuan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan," ungkap Prabowo
7. "Di partai saya juga beberapa wakil ketua umum sudah dari perempuan. Mereka sangat berperan. Di dunia akademis, di universitas-universitas saat ini sudah banyak sekali perempuan yang hebat-hebat, menonjol, dan brilian. Jadi, saya kira beberapa saat lagi pasti mereka akan muncul di tingkat nasional," pungkas Prabowo.

Sumber: <https://kumparan.com/kumparannews/soroti-peran-perempuan-di-politik-prabowo-ke-depan-akan-muncul-perempuan-hebat-21c7ddmSJ85>

Kutipan Prabowo menunjukkan transformasi budaya yang semakin mengakui dan menghargai peran perempuan dalam politik dan masyarakat. Ungkapannya menunjukkan penghargaan terhadap peran perempuan yang lebih besar dalam struktur kekuasaan politik, terutama di posisi penting seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan. Kata-kata seperti "hebat-hebat", "menonjol", dan "brilian" digunakan untuk menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian dan kontribusi perempuan dalam berbagai bidang, baik akademis maupun politik. Penggunaan gelar seperti "the iron lady" untuk menunjukkan seorang Menlu sebagai tokoh penting dalam politik dan menyebutkan beberapa gubernur yang luar biasa dari kalangan perempuan adalah cara untuk mengakui

kemampuan, kekuatan, dan kontribusi positif perempuan dalam posisi penting. Prabowo juga berharap lebih banyak perempuan diwakili di tingkat nasional, baik di politik maupun di bidang lain, seperti sebagai wakil ketua umum partai politik. Dalam keseluruhan, kutipan-kutipan tersebut menunjukkan perubahan budaya yang lebih mengakui perempuan dan mengakui peran dan kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang politik dan kepemimpinan. Teori linguistik menunjukkan betapa pentingnya bahasa untuk menggambarkan citra perempuan politik (Mondong, 2011). Ungkapan seperti "wanita besi" menggambarkan persepsi kekuatan dan keyakinan, menggambarkan bagaimana linguistik membentuk persepsi peran perempuan dalam politik. Selain itu, peran perempuan harus diakui dan dihargai, menurut teori budaya. Ini tercermin dalam pembentukan makna simbolis dalam wacana politik.

Jika sebelumnya Prabowo menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam politik dengan menekankan posisi strategis dalam kabinet, Anis membawa dimensi lain terkait persepsi perempuan terhadap politik. Anis menyoroti pandangan tradisional yang menyandarkan politik pada citra "dunia laki-laki", yang terkait dengan kekuasaan dan memperhatikan persaingan yang tidak selaras dengan nilai-nilai perempuan. Dalam wacana berita, Perempuan digambarkan sebagai domain yang "aneh". Komentar ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana perempuan melihat politik dari berbagai latar belakang budaya dan prinsip. Ini menambah aspek penting dalam representasi mereka di dunia politik. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut

1. Selama ini politik selalu identik dengan dunia laki-laki, dunia kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Politik bagi perempuan identik dengan sesuatu yang aneh karena politik dikaitkan dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.
2. Di dunia politik, kekuasaan yang digunakan dengan baik diwujudkan melalui kepatuhan, perubahan dan pembaharuan. Kenyataan membuktikan, di mana pun seorang warga negara baik laki-laki dan perempuan tidak mau berpolitik, secara sadar atau tidak sadar ia menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Karena mereka yang aktif dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan warga negara yang tidak mau berpolitik itu," papar Anis.
3. "Kehadiran perempuan di dunia politik juga untuk memenuhi prinsip keterwakilan substantif, yaitu sejauhmana kebijakan yang

dihasilkan oleh wakil rakyat sungguh-sungguh memenuhi kepentingan konstituennya. Selain itu, kehadiran perempuan di dunia politik merupakan upaya untuk mendorong terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan peran-peran antara laki-laki dan perempuan,” tutur Anis

4. “Masalah yang kerap dihadapi perempuan yang terjun di dunia politik diantaranya penunaian keseimbangan berbagai peran yang disandangnya, pandangan masyarakat yang negative terhadap dunia politik, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya dukungan finansial,” ungkapnya.

Sumber: <https://telusur.co.id/detail/pesan-anis-kepada-perempuan-yang-terjun-ke-politik-harus-fokus-tingkatkan-kualitas-diri>

Kutipan pertama menekankan stigma yang ada dalam budaya politik terhadap perempuan, menggambarkan politik sebagai hubungannya dengan kekuasaan dan persaingan dan lebih cocok bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih suka perdamaian dan harmoni daripada berpartisipasi dalam arena politik yang sering dianggap kasar dan berkuasa. Anis membuat pernyataan kedua yang menekankan betapa pentingnya tanggung jawab politik sebagai bentuk kekuasaan yang harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perempuan dianggap memiliki peran penting dalam mencapai keterwakilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dalam konteks ini. Namun, pernyataan ketiga menunjukkan bahwa perempuan menghadapi banyak masalah saat berpartisipasi dalam dunia politik. Mereka termasuk dianggap negatif oleh orang lain, mendapatkan dukungan yang tidak memadai, dan mencoba menjaga keseimbangan antara berbagai peran yang mereka mainkan. Hal ini menunjukkan budaya politik yang masih meragukan kemampuan perempuan dan peran mereka dalam politik. Ini juga menunjukkan bahwa mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar untuk mendorong partisipasi dan representasi mereka.

Pernyataan Anis menggambarkan peran politik memerlukan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Namun demikian, perempuan dihadapkan pada berbagai hambatan dalam budaya politik saat ini, termasuk pandangan negatif dan kurangnya dukungan. Ini sesuai dengan teori budaya yang mengatakan bahwa nilai, norma, dan stigma budaya dapat menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik (Kusumawiranti, 2021).

Pendekatan budaya dan linguistik membantu memahami pandangan Anis karena itu menunjukkan bahwa ada ketidaksetaraan dalam budaya politik yang

meragukan kemampuan dan kontribusi perempuan. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan memerlukan perubahan dalam wacana politik dan dukungan yang lebih besar agar mereka dapat berpartisipasi dan diakui sepenuhnya dalam ranah politik.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Ganjar terkait posisi perempuan dalam struktur kabinet. Anis menyoroti stigma dan kendala yang dihadapi perempuan dalam politik, sementara Ganjar menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam penempatan posisi kabinet adalah keahlian, bukan jenis kelamin. Dalam pandangan Ganjar, keahlian dalam bidang tertentu menjadi hal terpenting, seperti contoh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang dianggap sebagai contoh perempuan yang ahli dalam bidang masing-masing. Ini menegaskan pandangannya bahwa pilihan kabinet seharusnya lebih didasarkan pada kualifikasi dan keahlian, dan hal tersebut seharusnya dijadikan komitmen dalam struktur kabinet tanpa melihat gender sebagai faktor utama dalam penempatan posisi. Hal tersebut dapat dilihat pada tuturan Ganjar berikut

1. "Di kabinet tentu (perempuan) kita pertimbangkan, tapi yang paling dasar adalah zaken kabinet, apakah dia cukup ahli yang ada di situ," kata Ganjar
2. Ia mencontohkan, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kabinet Indonesia Maju sebagai representasi perempuan yang ahli. "Ini contoh-contoh sebenarnya kita bisa teruskan pada soal itu sebagai sebuah komitmen, kita paham soal itu," ujar Ganjar.
3. Harus ada afirmasi bagi perempuan untuk punya peran lebih besar dalam dunia politik. Ia pun menyebutkan bahwa sudah ada aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di partai politik yang terbentuk saat dirinya menjadi anggota DPR
4. 'Pak Ganjar, 30 persen untuk perempuan ketentuan di politik itu dihilangkan saja Pak biar kita sama. Eh Bu, enggak bisa Bu'. Perempuan dalam banyak hal itu tertinggal. Maka musti ada tindakan khusus," kata Ganjar.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/12462641/ganjar-pertimbangkan-perempuan-masuk-kabinetnya-jika-terpilih-tapi>

Kutipan-kutipan ini menunjukkan upaya untuk mendorong peran perempuan dalam politik Indonesia sambil menunjukkan masalah dan ketidakseimbangan yang masih ada di bidang politik. Pernyataan pertama menegaskan bahwa partisipasi perempuan yang aktif akan sangat penting untuk

keberhasilan bangsa Indonesia. Ini menunjukkan ideologi inklusivitas yang mengakui peran yang mungkin dimainkan perempuan dalam pembangunan negara.

Selanjutnya, Ganjar menekankan pentingnya kualifikasi dan keahlian dalam menentukan siapa yang layak duduk di kabinet tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Namun, ia memberikan contoh perempuan sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri sebagai bukti bahwa perempuan mampu dan berbakat untuk memegang posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan keinginan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya kemampuan dan kualitas untuk menunjuk orang untuk posisi politik.

Dalam pernyataan terakhir, afirmasi khusus dan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan di politik sangat penting. Dialog tersebut menunjukkan kesadaran akan ketidakseimbangan gender dalam politik dan menekankan bahwa langkah-langkah khusus atau kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Hal ini mencerminkan ideologi kesetaraan gender dan kebutuhan akan tindakan politik konkret untuk mencapainya. Sementara itu Muhaimin (Cak Imin) menyoroti komitmen untuk mewujudkan agenda pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan. Dengan keyakinannya bahwa peran perempuan Indonesia krusial dalam menentukan masa depan pembangunan nasional. Ia menegaskan pentingnya peran serta perempuan dalam mengukir kemajuan bangsa. Hal ini menandai komitmen kuat untuk memajukan peran perempuan dalam agenda nasional, memandangnya sebagai kunci kesuksesan bagi kemajuan Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut

1. "Insya Allah jika kami terpilih, maka agenda perempuan berdaya kita wujudkan sebaik-baiknya. Karena peran perempuan Indonesia ini sangat penting untuk menentukan pembangunan nasional kelak," ujar Cak Imin
2. "Saya yakin perempuan berdaya akan menghasilkan bangsa Indonesia yang berjaya," ungkapnya.

Sumber: <https://news.detik.com/pemilu/d-7076323/terima-dukungan-perdana-gibran-janji-kuatkan-perlindungan-perempuan-anak>

Pernyataan pertama menegaskan komitmen untuk mencapai agenda yang memberdayakan perempuan setelah mereka terpilih. Ini mencerminkan ideologi yang mendasarkan keberhasilan pembangunan nasional pada partisipasi perempuan yang aktif dan signifikan. Oleh karena itu, perempuan yang kuat dan mampu dianggap sangat penting untuk proses pembangunan negara.

Dalam pernyataan kedua, ditunjukkan bahwa perempuan yang berdaya memiliki peran besar dalam membangun bangsa yang maju dan berhasil. Ini menekankan ideologi kesetaraan gender dan menggarisbawahi betapa pentingnya mengakui peran perempuan dalam mencapai kemajuan bangsa. Dengan percaya pada potensi perempuan yang berdaya, ungkapan ini menekankan bahwa keterlibatan perempuan yang aktif dan konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan bangsa, sangat terkait dengan kesuksesan bangsa Indonesia.

1. Pertama ada hadis nabi surga itu ada di telapak kaki ibu. Itu kan bukan berarti surga ada di bawah kaki ibu itu adalah pesan simbolik bahwa sepak terjang kaum ibu akan meneguhkan masa depan anaknya," ujar Mahfud MD.
2. itu sebabnya ada dalil lain yang bunyinya kaum ibu itu adalah tempat sekolah tempat belajar yang paling bagus. Dan dalam bidang politik nabi bersabda bahwa perempuan itu tiang negara. Bila kaum perempuan di suatu negara baik maka negara itu akan menjadi baik seluruhnya," kata dia.
3. Tapi kalau perempuannya jelek maka negara itu akan menjadi jelek begitu pentingnya perempuan di dalam kehidupan manusia di dunia. Kami menyadari bahwa di indonesia perempuan yang jumlahnya setengah dari jumlah penduduk, memiliki peran penting di dalam kemajuan," pungkasnya.

Sumber: <https://news.detik.com/pemilu/d-7103017/hari-ibu-mahfud-bicara-peran-penting-perempuan-memajukan-indonesia>

Ideologi kesetaraan dan kesadaran akan peran penting perempuan dalam budaya dan kemajuan masyarakat muncul dari kutipan-kutipan tersebut. Pertama, pernyataan Mahfud MD mengaitkan kebesaran ibu dengan masa depan anak-anaknya, menunjukkan bahwa peran dan tindakan kaum ibu terkait erat dengan keberhasilan masa depan anak. Ini menunjukkan nilai budaya bahwa peran ibu membangun fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya.

Pernyataan berikut menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai pusat pembelajaran agama dan budaya. Nabi juga menyebut perempuan sebagai "tiang negara", menunjukkan betapa pentingnya perempuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi negara secara keseluruhan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa kualitas perempuan di masyarakat memengaruhi kualitas negara secara keseluruhan.

Terakhir, pernyataan yang menekankan bahwa kualitas masyarakat secara keseluruhan akan meningkat jika ada perempuan di dalamnya, menunjukkan ideologi bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa dan pengakuan akan kontribusi besar setengah populasi dalam membangun suatu negara.

1. "Hal-hal terkait perlindungan kaum perempuan, anak, ya ini nanti ke depan perlu kita sempurnakan dan kita perkuat lagi," kata Gibran dalam acara tersebut.
2. "Kira-kira itu saja ibu-ibu, matur nuwun. Terima kasih sekali. Mohon doanya agar semua dilancarkan dan dimudahkan sampai 14 Februari nanti. Terima kasih, terima kasih," kata Gibran.

Sumber: <https://news.detik.com/pemilu/d-7076323/terima-dukungan-perdana-gibran-janji-kuatkan-perindungan-perempuan-anak>

Dari pernyataan pertama Gibran, terpancar ideologi yang menekankan bahwa perlindungan kaum perempuan dan anak-anak harus menjadi hal yang paling penting untuk diprioritaskan di masa depan. Ini menunjukkan bahwa penting untuk melindungi dua kelompok ini dalam masyarakat dan mengakui peran dan hak mereka yang mungkin rentan terhadap berbagai masalah. Namun, pernyataan kedua menunjukkan budaya lokal memiliki penghargaan dan kesopanan. Dalam budaya, ungkapan terima kasih dan permohonan doa adalah cara penting untuk menunjukkan rasa terima kasih dan meminta restu dan dukungan dari lingkungan sekitar, yang menunjukkan perhatian terhadap interaksi sosial dan hubungan antar individu yang akrab.

Kutipan tersebut memberikan representasi budaya yang mencerminkan perubahan paradigma terkait peran perempuan dalam politik di Indonesia. Terdapat pengakuan atas penonjolan peran perempuan dalam berbagai bidang, seperti kabinet, posisi kunci dalam politik, dan keberhasilan mereka sebagai pemimpin di level lokal maupun nasional. Tidak hanya itu, kutipan-kutipan tersebut menyoroti kesadaran akan pentingnya kehadiran perempuan dalam politik untuk menjaga keseimbangan gender dan kepentingan konstituen. Namun, ada juga penekanan terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, termasuk pandangan negatif, kurangnya dukungan, dan peran yang seringkali terabaikan (Alimi, 2013).

Lebih dari itu, kutipan juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak, serta pengakuan akan peran sentral perempuan dalam membangun dan memajukan negara. Dalam hal ini, terdapat pesan simbolik dari budaya lokal,

seperti hadis Nabi yang menegaskan keutamaan perempuan dalam mencetak masa depan yang baik untuk anak-anak serta peran perempuan sebagai tiang negara. Selain itu, terdapat pengakuan terhadap pentingnya peningkatan perlindungan dan penguatan peran perempuan dan anak-anak ke depannya

Ini menunjukkan evolusi nilai-nilai budaya yang semakin memahami pentingnya peran perempuan dalam dunia politik serta perlunya dukungan dan perlindungan bagi mereka dalam mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari perubahan budaya yang lebih inklusif, di mana masyarakat semakin mengakui, menghargai, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, termasuk perempuan, dalam berbagai ranah kehidupan (Baidhaw, 2005; Ambarudin, 2016; Munadlir, 2016; Supriatin and Nasution, 2017; Irawati, 2020; Irawati, 2020). Peran perempuan dalam politik dan pemerintahan mencerminkan pergeseran budaya yang menghargai partisipasi perempuan dalam ranah publik. Hal ini sesuai dengan semangat feminisme yang menekankan pentingnya menghapus batasan gender dalam akses terhadap kesempatan dan pengakuan atas kontribusi individu tanpa memandang jenis kelamin (Baidhaw, 2005; Ambarudin, 2016). Hal ini juga sesuai dengan Teori Hegemoni yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai dan keyakinan tertentu dari kelompok dominan dalam masyarakat menguasai dan mendominasi pola pikir dan budaya yang diterima oleh masyarakat luas (Shaheed, 2023). Pencapaian perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, mencerminkan pergeseran budaya menuju pengakuan akan nilai-nilai inklusif dan penghargaan atas kontribusi perempuan, yang dapat meruntuhkan hegemoni budaya yang mendominasi oleh stereotip gender yang sudah ada.

SIMPULAN

Representasi ideologi dan kekuasaan melalui pilihan kata, frasa, dan kalimat dalam konteks peran perempuan dalam politik Indonesia menyoroti peran penting penggunaan bahasa dalam membentuk dan menggambarkan ideologi serta kekuasaan. Berbagai jenis kata seperti kata bantu/modalitas, kata kerja, kata benda, kata sifat, kata penghubung, dan frasa numeralia mengungkapkan nuansa ideologis yang berkisar dari kesetaraan gender hingga distribusi kekuasaan politik. Dari sisi nilai pendidikan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya inklusivitas, kesadaran politik, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan gender. Nilai-nilai ini tercermin dalam kesadaran akan peran penting perempuan dalam proses politik dan pembangunan nasional. Dalam nilai kebudayaan, penelitian ini menyoroti semangat untuk memajukan budaya yang lebih inklusif dan pengakuan atas prestasi serta kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa.

Ini menunjukkan pergeseran menuju budaya yang lebih progresif yang semakin menghargai peran perempuan dalam ranah publik. Penelitian ini memiliki batasan dalam konteks penggunaan bahasa yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek ideologi dan kekuasaan. Rekomendasi kedepannya termasuk perluasan cakupan analisis, penelusuran lebih mendalam terhadap variasi konteks penggunaan kata, frasa, dan kalimat, serta inklusi teori-teori linguistik atau analisis wacana yang lebih kompleks untuk menggali lapisan makna yang lebih mendalam.

REFERENCES

- (1) Alimi, M.Y. (2013) *Manusia, Perempuan, Laki-Laki*. DOI: 10.1002/cncr.20772.
- (2) Ambarudin, R.I. (2016) 'Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius'. *Jurnal Civics*, 13(1), pp. 28–45.
- (3) Assidik, G.K. and Santoso, B.W.J. (2016) 'Citra Publik Presiden Republik Indonesia Pada Pemberitaan Di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, Dan Harian Republika: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough'. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), pp. 201–215.
- (4) Baidhawry, Z. (2005) *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- (5) Fenti, F. and Eddyono, A.S. (2021) 'Analisis Wacana Kritis Tentang Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Media Alternatif Magdalene. Co'. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 3(2), pp. 123–137.
- (6) El Guindi, F. (2003) *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*. Penerbit Serambi.
- (7) Hendrastiti, T.K. (2021) *Tersembunyi Di Antara Harapan Tumbuh: Demokrasi Di Bumi Raflesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- (8) Huriani, Y. (2021).
- (9) Husein, M.I. and Wance, M. (2021) 'Analisis Wacana Kritis Berita Konflik Di Media Ambon Ekspres Dan Siwalima'. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), pp. 1995–2010.
- (10) Ilham, I., Anshari, A. and Amir, J. (2023) 'Representasi Kekuasaan Dalam Pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi'. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), pp. 1423–1436.
- (11) Irawati, I. (2020) 'Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi Di Indonesia'. *Instructional Development Journal*, 3(3), pp. 177–187.
- (12) Jupriono, D., Amilia, D.L. and Paramita, F.B.A.C. (2022) 'Bentuk Kalimat, Posisi Proposisi, Pronomina, Dan Nominalisasi Dalam Ragam

- Bahasa Politik'. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* (e-ISSN: 2797-0477), 2(01), pp. 42–54.
- (13) Kabanga, L., Tabuni, S. and Kalangi, A.N. (2023) 'Ideologi Dalam Pesan Paskah 2023: Pendekatan Analisis Wacana Kritis Dengan Model Fairclough'. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(4), pp. 1095–1110.
 - (14) Kiftiyah, A. (2019) 'Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia'. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), pp. 1–13.
 - (15) Kuncoro, H.R. *et al.* (2023).
 - (16) Kusumawiranti, R. (2021) 'Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa'. *Populika*, 9(1), pp. 12–19.
 - (17) Larasati, M. *et al.* (2023) 'PEGEMI (Peran Generasi Milenial) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Media Sosial'. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(3), pp. 505–517.
 - (18) Mondong, T. (2011) 'REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM IKLAN POND'S'. *Jurnal Inovasi*, 8(01).
 - (19) Munadlir, A. (2016) 'Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural'. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2), pp. 114–130.
 - (20) Nesi, A., Uswati, T.S. and Santoso, B.W.J. (2022) 'Tinjauan Kritis Statements Para Tokoh Tentang Kasus Tanah Golo Mori Dalam Pemberitaan Media Massa Daring (Critical Review of Personages Statements About the Golo Mori Land Dispute in the Online Mass Media Reportation)'. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(2), pp. 231–246.
 - (21) Nur Rohmah, S.R. (2022).
 - (22) Nursusetyo, R. (2021) 'Film Dan Bingkai Ketidaksetaraan Gender Pendekatan Analisis Wacana Kritis Pada Film "On The Basis Of Sex" Karya Mimi Leder'.
 - (23) Pesiwarissa, L.F., Hiariej, C. and Wuarlela, M. (2022) 'PERTARUNGAN KATA DALAM SLOGAN POLITIK (KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MALUKU): SUATU KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS'. *ARBITRER: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), pp. 705–720.
 - (24) Ruwaida, I. (2016) 'Pemberdayaan Dan Aksi Kolektif Perempuan: Sebuah Refleksi Sosiologis'. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(2), pp. 126–135.
 - (25) Shaheed, F. (2023) 'Countering the Production of Cultural Hegemony: Reflections on Women's Activism under Zia'. *Towards Peoples' Histories in Pakistan: (In) Audible Voices, Forgotten Pasts*, p. 219.
 - (26) Supriatin, A. and Nasution, A.R. (2017) 'Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia'. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 3(1), pp. 1–13.

- (27) <https://kumparan.com/kumparannews/soroti-peran-perempuan-di-politik-prabowo-ke-depan-akan-muncul-perempuan-hebat-21c7ddmSJ85>
- (28) <https://telusur.co.id/detail/pesan-anis-kepada-perempuan-yang-terjun-ke-politik-harus-fokus-tingkatkan-kualitas-diri>
- (29) <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/12462641/ganjar-pertimbangkan-perempuan-masuk-kabinetnya-jika-terpilih-tapi>
- (30) <https://news.detik.com/pemilu/d-7076323/terima-dukungan-perdana-gibran-janji-kuatkan-perlindungan-perempuan-anak>
- (31) <https://news.detik.com/pemilu/d-7076323/terima-dukungan-perdana-gibran-janji-kuatkan-perlindungan-perempuan-anak>
- (32) <https://news.detik.com/pemilu/d-7103017/hari-ibu-mahfud-bicara-peran-penting-perempuan-memajukan-indonesia>